

DAFTAR PUSTAKA

- Al Gifary, M. 2022. Tinjauan Perubahan Penegakan Hukum Pidana dalam UU HPP terhadap Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara. (*Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN*).
- Bastari, R.G., Faried, F. S., Djunaidi, A. 2022. Restoratif Justice Sebagai Wujud Pelaksanaan Azas Ultimum remidium di Dalam Tindak Pidana Perpajakan. *Prosiding*, 172–181.
- Burhanudin, A. A. 2018. Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*. 4(2): 50–67.
- Kartika, S. D., & Saputra, N. P. 2021. Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana. *Publica Indonesia Utama*.
- Kemenkeu. 2021. Dokumen APBN Kita edisi Mei 2021. [Www.kemenkeu.Go.id](http://www.kemenkeu.go.id).
<http://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>.
- Khalimi. 2021. Analisis Konsep Ultimum Remidium Terhadap Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. 4(2): 258–268.
- Manalu, B. R. 2022. Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. 3(5): 793–809.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 237/PMK.04/2022. *Tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.05/2022. *Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.05/2020 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 183/PMK.01/2020. *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/Pmk.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai*.

- Sedarmayanti. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Siregar, A. G. 2023. Implementasi Asas Ultimum Remedium Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Administratif. *Journal of Social Science Research*. 3(4): 10271–10285.
- Subardy, M. R., Ismansyah, Khairani. 2023. Efektivitas KUP dalam Memulihkan Kerugian Pendapatan Negara Akibat Tindak Pidana Administratif Perpajakan. *Unes Law Review*. 6(1): 1114–1128.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.